

# Niat Ingin Membangun Melawi Pemkab Rela Pinjam Uang ke Bank

**Eko Susilo**

Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Alternatif baru pun bergulir seiring dengan batalnya pembahasan Raperda Multiyears yang sedianya akan digunakan sebagai opsi untuk membangun sejumlah proyek fisik di Kabupaten Melawi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi memilih untuk melakukan pinjaman dana ke Bank Kalbar untuk mendanai berbagai proyek besar, termasuk persiapan arena MTQ tingkat Provinsi Kalbar yang akan digelar pada tahun

depan.

Wacana Pemkab untuk meminjam dana ke bank Kalbar sendiri diamini Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono ditemui oleh sejumlah wartawan sesuai sidang paripurna DPRD Melawi, Rabu (14/9) kemarin.

"Rencana itu muncul setelah kita berkonsultasi dengan BPK RI terkait dengan rencana pembangunan di Melawi yang akan menggunakan sistem multiyears. Namun, BPK kemudian menyarankan agar Pemkab Melawi sebaiknya meminjam uang ke bank karena proyek yang direncanakan

multiyears dapat dikerjakan dalam satu tahun anggaran," kata Ivo.

Dijelaskannya, pertimbangan tersebut diberikan BPK karena sistem pinjaman dianggap lebih aman ketimbang multiyears yang dianggap lebih beresiko. Hal ini juga yang kemudian melandasi Pemkab Melawi untuk merencanakan melakukan peminjaman ke bank Kalbar.

"Untuk pinjamannya, secara rinci saya tidak tahu persis. Kisarannya sekitar Rp 40 miliar hingga Rp 60 miliar," ungkap Ivo.

Salah satu peruntukkan dana pinjaman ini, ujar

Ivo adalah untuk membiayai pembangunan arena MTQ yang rencananya akan menggunakan GOR Nanga Pinoh. Sisanya untuk membiayai sejumlah proyek fisik dengan anggaran yang cukup besar. Dikatakannya, Pemkab melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi sudah berkonsultasi dengan bank Kalbar terkait dengan wacana peminjaman tersebut.

"Dari bank sudah tidak ada masalah. Angsuran pinjaman tersebut dapat dibayarkan selama beberapa tahun anggaran. Yang penting tidak melewati

masa jabatan bupati dan wakil bupati yaitu pada tahun 2015 sehingga tidak membebani kepala daerah yang baru nantinya," terang Ivo.

Dana pinjaman dari bank Kalbar ini sendiri, ujarnya akan masuk dalam APBD Perubahan 2011 ini. Kepastian peminjaman tersebut akan dibahas bersama DPRD karena diperlukan persetujuan dari pihak legislatif.

"Tinggal persetujuan dari DPRD untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Makanya kita akan bahas bersama dengan APBD Perubahan nantinya," jelasnya.